

## **BAB II**

### **KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL**

Reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional telah menjadi perhatian dunia internasional. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional meliputi modernisasi tata kelola dan representasi, penguatan kembali pengawasan, rekapitalisasi sumber-sumber dan penguatan jaringan pengaman finansial. Lembaga-lembaga keuangan internasional pun perlu diperkuat dari sisi tata kelola dan representasi dan kecukupan keuangannya agar dapat segera membantu negara-negara yang terkena krisis secara lebih efektif dan mendorong pertumbuhan global secara seimbang pada era pasca krisis finansial.

Melihat hal tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta sebagai penerima bantuan dari lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut perlu meningkatkan komitmen dan kontribusi di dalamnya.

Menurut laporan penelitian Tim Riset IORI, Higher School of Economics, National Research University dan Munk School of Global Affairs, University of Toronto, Indonesia menerima penilaian negatif sebab Indonesia dipandang hanya menjadi satu anggota MDB yaitu ADB dan satu ADF (Asian Development Fund). Dalam catatan mereka, Indonesia tidak melakukan komitmennya dalam

ADF. Indonesia memang tidak menjadi donor ADF dan karenanya tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran ADF. (Kemenkeu, 2015)

Sedangkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2013, pemerintah Indonesia telah berkomitmen meningkatkan kontribusinya pada lembaga-lembaga keuangan internasional. Di ICD (9 milyar Rupiah), ADB (353 milyar Rupiah), pada World Bank Group melalui IBRD (108, 6 milyar Rupiah), IFC (8,2 milyar Rupiah), IFAD (28,5 milyar Rupiah). Penyaluran melalui IFAD meningkat dari 19 milyar Rupiah di tahun 2012 menjadi 28,5 milyar Rupiah di tahun 2013. (Kemenkeu, 2015)

**Tabel 3: Penyertaan Modal Negara Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional 2012-2013 (dalam Milyar Rupiah)**

No	Uraian	APBNP 2012	RAPBN 2013
1	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	9,0	9,0
2	Asian Development Bank (ADB)	353,3	353,3
3	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD):	147,8	108,6
	- Pencairan Promisory Note	39,2	-
	- IBRD GCI (General Capital Increase)	66,8	66,8
	- IBRD SCI (Selected Capital Increase)	41,8	41,8
4	International Finance Corporation (IFC)	8,2	8,2
5	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	19,0	28,5
6	International Development Association (IDA)	4,6	-
<b>Jumlah</b>		<b>541,9</b>	<b>507,6</b>

Sumber: Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, tahun Anggaran 2013.

ADB sebagai lembaga keuangan finansial pembangunan regional yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan di negara-negara Asia dan pasifik dengan total asset sebesar 143,9 milyar USD menjadikannya sebagai lembaga keuangan terbesar kedua setelah World Bank. Di mana Indonesia merupakan pemegang saham terbesar keenam dengan jumlah saham sebesar 292 juta USD.

Di tahun 2010 bertempat di Bali pada sidang tahunan ADB ke 42, disepakati kenaikan modal atau *general capital increase* (GCI) yang merupakan kenaikan modal yang diberikan kepada seluruh negara anggota dalam rangka meningkatkan modal ADB sebesar 200 persen. Dalam kenaikan GCI tersebut, pemerintah Indonesia telah menambah penempatan saham sebesar 385,400 lembar dengan nilai 185.970.916,00 USD atau ekuivalen dengan 1,9 trilyun Rupiah melalui 5 kali angsuran pada tahun 2010-2014.

**Tabel 4: Penyertaan Modal Negara Lainnya 2012-2013**

**(dalam Milyar Rupiah)**

No.	Uraian	APBNP	RAPBN 2013
1	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	-	500,0
2	Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	-	500,0
3	ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	380,0	380,0
Jumlah		380,0	1.380,0

Sumber: Kementerian Keuangan Negara, *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, Tahun Anggaran 2013

Dalam komitmen mendukung ASEAN Infrastructure Fund (AIF) pemerintah Indonesia menyertakan modal negara sebesar 380 milyar Rupiah.

AIF yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN dan ADB guna menjadi sumber pembiayaan proyek infrastruktur ASEAN dengan memanfaatkan *domestic resources* serta kelebihan likuiditas di kawasan ASIA. (Kementerian Keuangan RI, 2013)

Kontribusi Indonesia pada World Bank terlihat melalui IBRD dan IFC (international finance corporation). IBRD dibentuk dengan tujuan menyediakan dana pinjaman untuk pembangunan dan kemajuan negara-negara berkembang. Indonesia telah menerima pinjaman dari IBRD sebesar 9,97 milyar USD untuk menutup defisit anggaran di tingkat kerjasama multilateral.

Pada sidang negara-negara anggota bulan April 2010 disepakati kenaikan modal Bank Dunia. Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi sebesar 35,15 juta USD dan Selected Capital Increase (SCI) sebesar 22 juta USD. Pemerintah berencana untuk membayar kenaikan modal tersebut selama 5 kali angsuran dari tahun 2012-2016. GCI dalam IBRD serupa dengan GCI dalam ADB yang dimaksudkan untuk meningkatkan modal IBRD. SCI sendiri merupakan peningkatan modal yang diberikan kepada negara-negara tertentu karena keberhasilannya dalam meningkatkan perekonomian domestiknya. Di tahun 2013, Indonesia mengalokasikan angsuran kedua GCI sebesar 7,03 juta USD (66,8 milyar Rupiah), dan SCI sebesar 4,4 juta USD (41,8 milyar Rupiah). (Kemenkeu, 2015)

IFC yang merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembayaran sektor swasta dengan tujuan mendorong mewujudkan pasar yang terbuka dan kompetitif di negara-negara berkembang, mendukung pembiayaan

perusahaan dan sektor swasta lainnya, membantu menciptakan lapangan kerja yang produktif, dan mengkatalisasi dan memobilisasi sumber dana untuk pengembangan perusahaan swasta.

Pada *Spring Meeting* IMF-Bank Dunia 9 Maret 2012, telah diadopsi resolusi nomor 256 tentang perubahan SCI (*Amendment to the Articles of Agreement and 2010 Selective Capital Increase*). Resolusi ini berlaku sejak 27 Juni 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan *authorized capital* IFC sebesar 130 juta USD dengan penerbitan 130.000 lembar saham (masing-masing memiliki par value 1.000 USD). Indonesia memandang perlu untuk menambah penyertaan modal sebesar 3,06 juta USD supaya *share* Indonesia tidak turun menjadi 1,11 karena kenaikan SCI tersebut. Tambahan modal tersebut diangsur tiga kali pada tahun 2012 – 2013. Tahun pertama sebesar 858 ribu USD (8,2 milyar Rupiah) dibayarkan pada tahun 2012, dan angsuran kedua dengan jumlah yang sama akan dibayarkan pada tahun 2013. (Kemenkeu, 2015)

Kontribusi Indonesia melalui penyertaan modal negara pada sejumlah lembaga keuangan internasional memperlihatkan komitmen Indonesia untuk ikut andil meningkatkan pengaruhnya pada lembaga-lembaga keuangan internasional baik di tingkat global dan regional (ASIA) dengan tidak hanya sebatas menjadi negara penerima pinjaman, tetapi juga berperan dalam peningkatan pembangunan internasional.

## A. Indonesia dalam World Bank (WB)

World Bank atau Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 di Bretton woods, New Hampshire, Amerika Serikat, sehingga sering disebut *The Bretton Woods Institutions* (BWIs). Situasi perekonomian dunia yang tidak menentu selama berkecamuknya perang dunia kedua dan pasca perang menyebabkan adanya kecemasan akan berulangnya kembali *Great Depression* di tahun 1930 melatarbelakangi pembentukan bank dunia demi membantu stabilitas ekonomi global.

Pembangunan kembali Eropa pasca perang dunia kedua adalah fungsi awal dari Bank Dunia yang kemudian berkembang dan tidak lagi terbatas pada upaya rekonstruksi perang, tetapi juga meliputi pembiayaan rehabilitasi akibat bencana alam, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, rehabilitasi ekonomi setelah masa konflik antar negara, serta sebagai wadah untuk menyalurkan dana dari negara-negara kaya untuk pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang atau negara miskin.

Bank dunia terdiri dari dua lembaga utama yaitu *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *International Development Association* (IDA). IBRD berfokus memberikan bantuan kepada negara-negara berpenghasilan menengah yang layak kredit, sedangkan IDA membantu negara-negara dengan ekonomi termiskin. Bank dunia juga bekerja sama dengan lembaga lain termasuk *International Finance Corporation* (IFC), *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), dan *International Centre for Settlement of Investment*

*Disputes* (ICSID). (Apa itu Bank Dunia? Fakta, Sejarah & Informasi Lainnya, 2016)

Keuangan Bank Dunia berasal dari investasi oleh negara-negara anggotanya yang berjumlah 286 negara. Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalah Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara ini berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan berhak pula dalam memilih Presiden Bank Dunia. (Sulaeman, 2009)

Dalam meminjamkan kepada negara yang dilanda krisis ekonomi, Bank Dunia mensyaratkan beberapa hal seperti, melakukan penyesuaian kebijakan domestik. Hal tersebut sering disebut dengan program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Program; SAP*). (Ikodar, 2003)

Pinjaman dalam rangka SAP, diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. *Structural adjustment loans* (SALz), dimaksudkan untuk mendukung reformasi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ciri utama SALz adalah bahwa fokusnya terutama pada isu-isu struktural ekonomi makro, seperti: kebijakan perdagangan, penggunaan sumber daya, pengelolaan sektor publik, pengembangan sektor swasta, serta jaringan pengamanan sosial.
2. *Sector adjustment loan* (SECAL), dimaksudkan untuk mendukung perubahan kebijakan dan reformasi kelembagaan pada sebuah sektor tertentu. Fokus SECAL terutama terletak pada isu-isu seperti kerangka kerja peraturan dan

intensif untuk pengembangan sektor swasta, kapabilitas kelembagaan, dan program pengeluaran pada sesuatu sektor.

3. *Programmatic structural adjustment loan (PSAL)*, disediakan dalam konteks kerangka kerja multi tahun guna mendukung program pemerintah dalam jangka menengah dalam reformasi kebijakan dan pembangunan kelembagaan. PSALs mendukung program pemerintah melalui serangkaian pinjaman yang ditetapkan untuk masa 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun untuk menopang reformasi sosial dan struktural secara bertahap dan berkelanjutan. Pada dasarnya jangka waktu pinjaman PSAL adalah selama setahun dengan target tertentu yang terukur. Oleh karena itu pada tiap-tiap seri pinjaman tersebut ditetapkan indikator-indikator yang dapat dimonitor. Ada pun mengenai persyaratan dan cara pencairan uangnya sama dengan SAL.
4. *Special structural adjustment loan (SSAL)* dimaksudkan untuk mendukung reformasi sosial dan struktural dengan memberi kelayakan kredit (*creditworthy*) kepada negara peminjam yang diambang krisis, atau telah terlanda krisis, dan amat sangat membutuhkan dana untuk pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, SSAL disediakan bagi negara-negara yang secara nyata sedang menghadapi, atau potensial menghadapi, krisis finansial dengan dimensi sosial dan struktural yang substansial. Pinjaman ini merupakan dukungan untuk reformasi struktural, sosial, dan kebijakan ekonomi makro, yang merupakan bagian dari paket dukungan internasional yang disediakan bersama-sama oleh donor multilateral, donor-donor bilateral, serta investor dan pemberi pinjaman dari kalangan swasta. Dalam



kaitan ini, pinjaman SSAL baru dapat diberikan jika telah ada program kerjasama dengan IMF.

5. *Rehabilitation Loan* (RIL), dimaksudkan untuk mendukung program reformasi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi sektor swasta, di mana kurs asing diperlukan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas produktif dan infrastruktur strategis. Fokusnya adalah pada reformasi kebijakan sektor-sektor penting dan ekonomi makro berjangka pendek yang diperlukan untuk menanggulangi penurunan asset produksi dan kapasitas infrastruktur. RIL biasa digunakan ketika suatu negara telah menyatakan kesediaannya untuk melakukan reformasi perekonomian secara menyeluruh namun peminjam dalam kerangka SAL tidak bisa dipakai oleh karena agenda reformasistruktural negeri ini baru dimulai. RIL cocok untuk situasi paska konflik dan perekonomian yang sedang dalam masa transisi.
6. *Debt Reduction Loan* (DRL) dimaksudkan untuk membantu negara yang terlilit hutang dalam jumlah besar yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan hutang komersial dan mendapatkan layanan pinjaman sampai tingkat tertentu, sebagai bagian dari rencana pembiayaan jangka menengah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokusnya adalah pada rasionalisasi hutang yang menjadi tanggungan sesuatu negara pada bank komersial luar negeri, baik dengan mengubah hutang tersebut dalam hutang dengan bunga yang rendah maupun dengan memberi talangan untuk menutupnya dengan meminta pengurangan. Meski DRL bukan

tergolong *adjustment loan*, proses pelaksanaannya sering dilakukan secara bersamaan dengan *adjustment loan*, dimana bagian dari dana dari *adjustment loan* juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengurangan hutang. Dalam pelaksanaannya staf bank dunia membantu membuat rancangan kegiatan yang sesuai dengan kriteria bank dunia namun mereka tidak turut secara langsung dalam perundingan antara negara peminjam dengan para kreditor komersialnya. (Ikodar, 2003)

SAP yang diterapkan Bank Dunia sebagian besar memengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara. Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negara penerima hutang melakukan “perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi. (Sulaeman, 2009)

Indonesia dan Bank dunia sendiri memiliki sejarah yang panjang. Pada April 1967 Indonesia kembali bergabung dalam Bank Dunia setelah menarik diri sebagai anggota pada Agustus 1965. Suatu misi Bank Dunia yang besar dikirim pada akhir tahun 1967 yang disusul dengan suatu perjanjian untuk membentuk suatu kantor resident di Jakarta, yang secara resmi didirikan pada September 1968. Semenjak itu, Bank Dunia telah memberikan hampir \$25 milyar (termasuk pembatalan) kepada pemerintah dalam mendukung 280 proyek-proyek dalam segala sektor ekonomi – pertanian, pendidikan, kesehatan, pengembangan sosial, transportasi, tenaga listrik, infrastruktur – selain membantu dalam penyusunan

kebijakan ekonomi, pengembangan kelembagaan, dan program-program pengentasan kemiskinan. (The World Bank Group, 2016)

Secara sektoral, infrastruktur (tenaga listrik, telekomunikasi dan perhubungan) menyerap bagian yang terbesar yaitu 40 persen dari keseluruhan pinjaman Bank Dunia pada masa Tahun Fiskal 1969 hingga 1978, disusul oleh pertanian sebesar 19 persen, pendidikan, kesehatan, nutrisi dan populasi sebesar 13 persen, kemudian perkotaan, air minum dan sanitasi sebesar 10 persen. Sesuai perkembangan waktu terdapat perubahan komposisi yang penting: bagian pertanian telah menurun secara dramatis dibandingkan dengan meningkatnya bagian untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, nutrisi dan populasi, perkotaan dan air minum dan sanitasi. (The World Bank Group, 2016)

Bank Dunia mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, sekitar tahun 1968. Namun sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia “menjajaki” Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makro ekonomi, kebijakan sektoral yang diperlukan, dan kebutuhan pendanaan yang kritis. (Hutagalung, 2009)

Di masa-masa awal pemberian pinjaman, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang memiliki nilai *credit worthiness* yang rendah. Oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia pada saat itu menggunakan skema IDA atau pinjaman tanpa bunga, kecuali *administrative fee*  $\frac{3}{4}$  persen per tahun dan jangka waktu pembayaran 35 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Dana

pinjaman pertama yang diberikan kepada Indonesia adalah sebesar 5 juta dolar AS pada September 1968. (Hutagalung, 2009)

Pada masa-masa awal tersebut, dana pinjaman dari Bank Dunia digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian, perhubungan, perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia berhasil menunjukkan performa ekonomi yang memuaskan, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun, jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara peminjam yang lain. Oleh karena itu, sejak akhir dekade 70-an Indonesia sudah mulai dianggap sebagai negara yang lebih *credit worthy* untuk memperoleh pinjaman Bank Dunia yang konvensional atau dengan menggunakan skema IBRD. Berbeda dari periode sebelumnya, pada dekade 80-an, pinjaman uang Bank Dunia terlihat lebih terarah pada masalah deregulasi sektor keuangan, selain masih tetap digunakan bagi pengembangan sektor-sektor sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. (Hutagalung, 2009)

Pada awal dekade 90-an hingga sebelum memasuki krisis moneter tahun 1997, Indonesia menunjukkan performa ekonomi yang mengagumkan, bahkan sempat dijuluki sebagai salah satu *Asian Miracle*. Laporan dan analisis Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia acap kali dihiasi dengan berbagai pujian. Sayangnya, performa ekonomi yang memikat tersebut ternyata lebih tepat sebagai “penundaan masalah”.

Kekeliruan dan dampak negatif dari bantuan Bank Dunia, baik berupa dana pinjaman maupun anjuran kebijakannya, terbukti nyata (meski bukan faktor satu-satunya) pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997.

Liberalisasi sektor keuangan yang didukung penuh oleh Bank Dunia terbukti tidak cocok, bahkan mencelakakan, Indonesia. Pada saat krisis terjadi, mungkin salah satu bantuan paling berharga yang diberikan oleh Bank Dunia berupa persetujuan atas permintaan pemerintah Indonesia untuk membatalkan pinjaman yang tidak terserap sebesar 1,5 miliar dolar AS dan menyesuaikan (realokasi) pinjaman lainnya sebesar 1 miliar dolar AS untuk membiayai program mendesak, seperti bantuan biaya sekolah, beasiswa, dan jaring pengaman sosial. (Lutfi, 2014)

Pasca krisis yang melanda Indonesia, bantuan Bank Dunia masih terus berlanjut, terutama difokuskan pada kelanjutan pemulihan ekonomi, penciptaan pemerintah yang transparan, dan penyediaan pelayanan umum yang lebih baik, terutama bagi kelompok miskin. Tetapi tidak dapat dipungkiri, krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 memberi pelajaran berharga mengenai dua mata pisau yang diberikan oleh “bantuan” Bank Dunia.

## **B. Indonesia dalam Asian Development Bank (ADB)**

Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank* (ADB) adalah sebuah bank internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. ADB didirikan pada tanggal 19 Desember 1966 di Manila. Piagam pendiriannya ditandatangani oleh perwakilan dari 31 negara. (Dasar Pengetahuan, 2015)

Sebagai salah satu lembaga keuangan internasional, ADB menunjukkan perhatian yang cukup besar dalam membantu pembangunan di negara-negara berkembang (*Developing Member Countries/DMCs*). Pemberian bantuan ADB tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan adanya himbauan dan permintaan dari badan-badan internasional kepada negara-negara maju untuk ikut serta di dalam membantu negara-negara yang sedang berkembang. (Dasar Pengetahuan, 2015)

ADB memiliki visi “wilayah Asia dan Pasifik yang bebas dari kemiskinan.” Adapun misi ADB adalah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi serta kualitas kehidupan negara anggota ADB yang berasal dari kalangan negara sedang berkembang. (Dasar Pengetahuan, 2015)

Pembiayaan ADB bersumber dari OCR (*Ordinary Capital Resources*) dan ADF (*Asian Development Fund*). OCR adalah *subscribed capital* negara-negara anggota, cadangan dan dana yang dihimpun melalui pinjaman dari pasar internasional. Syarat pinjaman dari sumber ini antara lain *lending rate* 6,46%, *commitment fee* 0,75%, *maturity period* rata-rata 23 tahun, dan *grace period* rata-rata 5 tahun. (wikiapbn, 2015)

ADF adalah bantuan lunak dari sumbangan sukarela negara-negara anggota dan penghasilan bersih operasi ADB. Syarat pinjaman dari sumber ini antara lain: *grace period* rata-rata 8 tahun, *maturity period* untuk proyek rata-rata 32 tahun, *maturity period* untuk program rata-rata 24 tahun, *Administrative charge* selama *grace period* 1%, *administrative charge* selama *amortization* 1,5%. Tidak ada *commitment fee* dan *equal amortization*. (wikiapbn, 2015)

Indonesia menjadi anggota ADB sejak tahun 1968 dengan jumlah kekuatan suara sebesar 104.887 suara atau 5,2% dari keseluruhan jumlah suara. Sedangkan *Voting Power* Indonesia per Desember 1999 adalah sebesar 207.638 suara yang merupakan 4,793% dari *Regional Votes*, jumlah kekuatan suara negara anggota di wilayah Asia yang berjumlah 42 negara. (Dasar Pengetahuan, 2015)

Indonesia adalah salah satu pendiri *Asian Development Bank* (Bank Pembangunan Asia atau ADB), dan menjadikan ADB mitra jangka panjang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, ADB bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, pihak swasta, dan mitra pembangunan lainnya dalam bidang infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, pembangunan sektor keuangan, pengelolaan sektor publik dan reformasi kebijakan. Kemitraan dengan universitas-universitas besar di Indonesia dan organisasi masyarakat sipil diarahkan untuk mendukung pertukaran ilmu pengetahuan. Disamping itu ADB juga meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta melalui kegiatan operasional di sektor swasta dan mendukung kemitraan publik dan swasta. (Asian Development Bank, 2012)

ADB telah menyetujui pinjaman dengan dan tanpa jaminan pemerintah sebesar \$30,19 milyar, \$432,06 juta dalam bentuk bantuan teknis, dan \$429,98 juta dalam bentuk hibah untuk Indonesia. Strategi kemitraan Indonesia saat ini (*Country Partnership Strategy/CPS*) berfokus pada pertumbuhan yang inklusif dan kelestarian lingkungan. Sektor yang menerima dukungan prioritas antara lain pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, energi, keuangan, transportasi, dan pasokan air bersih serta layanan perkotaan lainnya. CPS mendukung dua tujuan

pembangunan jangka menengah Indonesia: pembangunan ekonomi seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan tata kelola yang lebih baik. (Asian Development Bank, 2014)

**Tabel 5: Indonesia: Pinjaman Kumulatif, Hibah, dan Bantuan Teknis yang disetujui<sup>a, b</sup>**

Sektor	No.	Nilai Total (\$ juta) <sup>c</sup>	% <sup>c</sup>
Pertanian, Sumber Daya Alam dan pembangunan Pedesaan	273	4.299,40	14,05
Pendidikan	80	2.455,75	8,03
Energi	81	4.416,29	14,43
Keuangan	66	4.111,43	13,44
Kesehatan	45	1.104,76	3,61
Industri dan Perdagangan	39	660,58	2,16
Multisektor	28	1.797,20	5,87
Manajemen Sektor Publik	107	5.795,46	18,94
Transport	89	3.701,00	12,10
Pasokan Air Bersih dan Infrastruktur Perkotaan serta Pelayanan Lainnya	92	2.253,59	7,37
<b>Total</b>	<b>900</b>	<b>30.595,45</b>	<b>100,00</b>

Keterangan:

- Hibah dan bantuan teknis mencakup pembiayaan bersama.
- Mencakup pinjaman dengan jaminan pemerintah dan tanpa jaminan pemerintah dan bantuan teknis.
- Jumlah mungkin tidak tepat karena pembulatan.

Sumber: Asian Development Bank dan Indonesia (Lembar Fakta 2014)

ADB dan Pemerintah Indonesia bekerjasama untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS), sektor swasta, dan mitra pembangunan lainnya, dan ADB bekerja dengan universitas-universitas besar di Indonesia dan OMS untuk mendukung pertukaran pengetahuan. (Asian Development Bank, 2014)



ADB bekerjasama dengan sektor swasta, mendukung kemitraan pemerintah dan swasta, dan berusaha untuk memobilisasi sumber daya pembangunan tambahan. Dana sebesar \$17,65 juta dari *Japan Fund for the Joint Crediting Mechanism*, diumumkan pada bulan Juni 2014, memberikan pembiayaan untuk mendorong penerapan teknologi yang telah terbukti baik namun belum banyak digunakan di Indonesia dan negara-negara anggota ADB lainnya. (Asian Development Bank, 2014)

Dalam perkembangannya, bantuan ADB yang diterima Indonesia mengandung persyaratan yang semakin berat. Bantuan dengan persyaratan lunak berubah menjadi semakin berat suku bunganya karena pinjaman biasa dalam OCR dikenakan *front end fee* yang pada saat sebelum krisis hal ini tidak ada. Dengan adanya *front end fee*, jumlah pinjaman yang diterima tidak sebesar total pinjaman yang disepakati. (wikiapbn, 2015)

Perubahan ini terutama disebabkan oleh perkembangan pasar kredit internasional dan terbatasnya dana murah ADB yang tersedia. Bantuan ADB hanya diprioritaskan kepada negara-negara anggota baru ADB untuk wilayah Asia yang digolongkan sebagai negara peminjam (*borrowing members*) yang benar-benar sangat membutuhkan dana tersebut untuk memulihkan kembali perekonomian di negaranya. (wikiapbn, 2015)

Sementara itu, seiring dengan keadaan ekonomi Indonesia yang dianggap semakin baik telah menimbulkan perubahan sikap negara atau badan pemberi bantuan termasuk ADB terhadap Indonesia. Indonesia dianggap tidak layak lagi untuk memperoleh bantuan ADB dengan persyaratan lunak. Hal inilah yang

mendorong Pemerintah Indonesia untuk menempuh kebijaksanaan dan strategi penerimaan bantuan ADB dengan sangat hati-hati. Bantuan ADB berperan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan di samping sumber lainnya berupa tabungan pemerintah, tabungan masyarakat dan investasi modal asing, serta sumber di dalam negeri lainnya.

Sejalan dengan itu, bantuan ADB tersebut digunakan sebagai pelengkap dari keseluruhan pembiayaan pembangunan nasional yang pemanfaatannya sebagian besar untuk membiayai pembangunan proyek-proyek prasarana, sarana, dan proyek lain yang produktif dan sesuai dengan pentahapan pembangunan yang bersifat proyek fisik maupun nonfisik. Akan tetapi, bantuan dari ADB tidak lepas dari kritik atas sisi negatifnya. Bantuan ADB dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia terlalu berorientasi ekonomi swasta dan terlalu terkait erat ke negara industri barat. Di mana dalam rangka peningkatan industrialisasi, ADB sangat berorientasi ekspor menurut model pembagian kerja internasional, sehingga kebutuhan dasar rakyat menjadi terabaikan.

### **C. Indonesia dalam ASEAN Infrastructure Fund (AIF)**

Krisis keuangan Asia tahun 1997 merupakan kondisi keuangan yang sangat mempengaruhi perekonomian ASEAN, krisis yang kemudian terjadi di tahun 2008 menjadi pukulan selanjutnya, tetapi semua krisis tersebut dapat dilalui dengan baik dan ekonomi ASEAN dapat pulih dengan cepat dan tumbuh positif. Namun di sisi yang lain hal tersebut menumbuhkan kebutuhan ASEAN untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perekonomian secara

berkelanjutan. Dan yang menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi ASEAN adalah dalam penyediaan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Dibandingkan dengan kawasan lain di dunia, seperti ASIA, Amerika Latin, dan Afrika, infrastruktur di kawasan ASEAN dapat dikatakan lebih rendah dari kawasan-kawasan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 6: Perbandingan Global Cakupan Pelayanan Infrastruktur**

<b>Kawasan</b>	<b>Jalan (km)</b>	<b>Jalan Kereta (Km)</b>	<b>Telepon (Jumlah)</b>
<b>Per Seribu Penduduk</b>			
<b>ASEAN</b>	10.51	0.27	3.53
<b>Asia</b>	12.83	0.53	3.47
<b>OECD</b>	211.68	5.21	13.87
<b>Latin Amerika</b>	14.32	2.48	6.11
<b>Afrika</b>	n.a.	0.95	1.42
	<b>Elektrifikasi (%)</b>	<b>Air Bersih (%)</b>	
<b>ASEAN</b>	71.69	86.39	
<b>Asia</b>	77.71	87.72	
<b>OECD</b>	99.80	99.63	
<b>Latin Amerika</b>	92.70	91.37	
<b>Afrika</b>	28.50	58.36	

Sumber: ADB, UNDP, dan UNESCAP 2010 MDGs: Path to 2015

Dalam hal pengadaan infrastruktur, ASEAN mengalami kesenjangan infrastruktur (infrastructure gap) yang artinya bahwa tingkat pembangunan dan penyediaan infrastruktur antara satu negaradan negara yang lain berbeda-beda. Dalam konteks integrasi ASEAN, kesenjangan infrastruktur di kawasan ASEAN membatasi pencapaian tujuan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),

dikarenakan MEA mengedepankan nilai penting konektivitas di antara negara-negara anggota ASEAN.

Melihat kenyataan tersebut, Inisiatif pembentukan *ASEAN Infrastructure Fund* (AIF) mulai muncul pada pertemuan Menteri Keuangan ASEAN (*ASEAN Finance Ministers' Meeting / AFMM*) ke-10 di Kamboja yaitu pada tahun 2006. Inisiatif ini muncul atas prakarsa dari Malaysia dengan mempertimbangkan adanya kelebihan cadangan devisa pada negara-negara ASEAN dan kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Pada pembahasan awal disepakati bahwa kelebihan dana cadangan devisa negara-negara ASEAN akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur di ASEAN. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan dimaksud, dibentuklah *ASEAN Infrastructure Financing Mechanism Task Force* (AIFM *Task Force*). Sesuai kesepakatan bersama, *Task Force* dimaksud diketuai oleh Malaysia sebagai inisiator pembentukan sebuah lembaga pembiayaan infrastruktur untuk ASEAN. (Janis, 2012)

Pembentukan AIF pun didasarkan pada tujuan menunjang pembangunan regional ASEAN dan bukan dengan motif untuk memaksimalkan keuntungan. AIF dibentuk sebagai entitas korporasi yang dimiliki oleh pemerintah negara-negara ASEAN dan ADB, dan menerbitkan obligasi untuk pendanaan tambahan. Obligasi yang dikeluarkan diharapkan memiliki peringkat investasi tinggi, yang bisa dibeli oleh berbagai entitas terkemuka, termasuk bank sentral. (Hasan, 2014)

AIF memiliki kantor pusat di Malaysia dan maka dari itu harus mematuhi semua formalitas yang diperlukan oleh korporasi yang berbasis di Malaysia,

dikarenakan AIF terdaftar sebagai Perseroan Terbatas (PT) di Malaysia. Sebagai perusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum Malaysia, AIF juga harus mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh yurisdiksi pemerintah Malaysia. Selain itu, didasarkan pada pemahaman umum bahwa dibutuhkan transparansi untuk menjaga stabilitas kerangka peraturan yang berlaku, maka AIF juga mengeluarkan dokumen-dokumen hukum untuk memastikan tata kelola yang baik, sehingga hak dan kewajiban dari AIF dan semua pihak yang terkait akan menjadi jelas. (Hasan, 2014)

AIF yang dibentuk berdasarkan kombinasi kontribusi negara-negara ASEAN dengan ADB memiliki total komitmen kontribusi sebesar US\$ 485.2 juta, terdiri dari kontribusi negara-negara ASEAN sebesar US\$ 335.2 juta, dan kontribusi ADB sebesar US\$ 150 juta. Besaran dari kontribusi yang diberikan oleh para pemegang saham (Shareholders) dalam AIF akan membawa dampak pada besaran voting power (hak suara) masing-masingnya.

**Tabel 7: Equity Contribution and Voting Power** (Hasan, 2014)

<b>Country</b>	<b>Equity (US \$ Millions)</b>	<b>Voting Power</b>
<b>Brunei</b>	\$10.00	2.13%
<b>Cambodia</b>	\$0.10	0.02%
<b>Indonesia</b>	\$120.00	25.52%
<b>Lao PDR</b>	\$0.10	0.02%
<b>Malaysia</b>	\$150.00	31.90%
<b>Philippines</b>	\$15.00	3.19%
<b>Singapore</b>	\$15.00	3.19%
<b>Viet Nam</b>	\$10.00	2.13%
<b>Subtotal</b>	\$320.20	68.10%
<b>ADB</b>	\$150.00	31.90%
<b>TOTAL</b>	\$470.20	100.00%

Dari tabel di atas, Indonesia telah memberikan komitmennya untuk memberikan kontribusi sebesar US\$ 120 juta, dan merupakan kontributor terbesar kedua di ASEAN, Dari kontribusi tersebut, Indonesia berhak atas 25.52 persen hak suara. Dalam tata kelola yang diusulkan di AIF, hak suara para pemegang saham memiliki peran dalam pengambilan keputusan di AIF. Berdasarkan *Shareholders' Agreement* AIF, pasal 4 tentang Governance Structure, dinyatakan bahwa pemegang keputusan tertinggi di AIF adalah Dewan Direktur yang beranggotakan perwakilan dari seluruh pemegang saham AIF. Untuk keputusan yang bersifat operasional, Dewan Direktur AIF akan memutuskan dengan ketentuan persetujuan lebih dari 50 persen hak suara, dan didukung oleh lebih dari 50 persen jumlah pemegang saham. Sementara itu, untuk keputusan yang bersifat fundamental, yakni: (i) persetujuan keanggotaan baru; (ii) perubahan dalam share modal ekuitas AIF; (iii) penentuan domosili AIF; dan (iv) pembubaran AIF, dibutuhkan persetujuan Dewan Direktur dengan sedikitnya 67 persen hak suara, dan didukung oleh sedikitnya 67 persen dari jumlah pemegang saham. (Hasan, 2014)

Indonesia sebagai negara dengan tingkat integrasi domestik yang tergolong paling rendah di ASEAN diharuskan untuk meningkatkan konektivitas domestiknya agar mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal dan meminimalisir kerugian yang akan didapat dari proses integrasi yang lebih dalam di ASEAN. Oleh karena itu, demi meningkatkan kualitas konektivitas Indonesia yang merupakan *the weakest link* dari keseluruhan konektivitas di ASEAN, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan dukungan besar terhadap

integrasi ASEAN, salah satunya adalah dengan cara menjadi negara yang pertama kali menyetujui AIF dan salah satu pendana awal terbesarnya.

Potensi *leadership* Indonesia di ASEAN ini dapat dibangun dengan cara mendukung pembentukan dan pendanaan *ASEAN Infrastructure Fund*. Tidak hanya itu, menjadi salah satu pemberi dana terbesar di ASEAN akan menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam mendukung program ASEAN dan kemajuan bersama di ASEAN. Semua itikad tersebut pada akhirnya diharapkan akan memberikan *soft power* lebih kepada Indonesia sebagai negara yang secara tersirat dianggap sebagai figur pemimpin yang ideal di ASEAN.

Zahirul Alim dalam bukunya menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kepemimpinan yang nyata di Asia Tenggara, Indonesia telah menginspirasi banyak negara-negara di kawasan maupun diluar kawasan dengan menyumbangkan gagasan-gagasan konseptual dan intelektual misalnya Pancasila, Trisakti, Berdiri Diatas Kaki Sendiri (Berdikari), *Non Alignment Conference Emerging Forces* (CONEFO), *Game of New emerging Forces* (GANEF0), *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN), dan termasuk pendirian ASEAN sendiri. Kebijakan mendukung pendanaan terhadap AIF akan melanjutkan tradisi dan meningkatkan potensi kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara. (Primayoga, 2015)

Dari segi politik, tarik-menarik kepentingan di dalam negeri dapat dipastikan akan meningkat, para politisi baik di daerah maupun di pusat akan memiliki pendapat dan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam menanggapi peningkatan konektivitas ini. Jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius,

permasalahan birokrasi dapat menjadi ganjalan yang bahkan mungkin lebih parah daripada kelemahan infrastruktur yang ada sekarang. Beberapa daerah mungkin akan memilih untuk tidak meningkatkan konektivitasnya dengan dunia luar untuk menjaga kelestarian alam, budaya, dan nilai-nilai kedaerahannya. Namun hal itu juga pastinya akan bertolak belakang dengan tujuan dan visi Indonesia dalam MP3EI untuk menjadi salah satu dari 12 negara maju di dunia pada tahun 2045. Perbedaan-perbedaan seperti ini dikhawatirkan akan mengancam pelaksanaan *ASEAN Connectivity* dan membuat pendanaan AIF sia-sia. (Primayoga, 2015)

Tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi konflik-konflik perbedaan suku dan budaya yang akan terjadi sebagai akibat dari meningkatkan konektivitas. Mengingat begitu pluralnya masyarakat Indonesia, perbedaan sangat banyak terdapat di berbagai aspek kehidupan. Bukan tidak mungkin konflik-konflik serupa akan muncul seiring dengan semakin terkoneksi antar daerah di Indonesia. Menurut Guido Benny and Kamarulnizam Abdullah dalam penelitiannya yang berjudul *Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community*, disebutkan bahwa pemerintah sebenarnya secara sepihak telah mengambil keputusan-keputusan berbagai program dan perjanjian rangkaian pelaksanaan *ASEAN Community* dan program persiapannya termasuk kebijakan pendanaan AIF tanpa melibatkan atau mempertimbangkan pendapat masyarakat. (Benny & Abdullah, 2011) Pengambilan keputusan yang sepihak dan terkesan terburu-buru tersebut tentunya beresiko menghasilkan dampak-dampak yang tidak diinginkan secara sosial maupun aspek-aspek lainnya.